BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara memiliki tujuan nasional yang mana kemudian dapat ditungkan dalam bentuk kebijakan luar negeri sebagai aksi untuk mencapainya. Di dalam hubungan internasional tentu banyak bentuk interaksi yang terjadi baik itu antarnegara maupun bukan negara. Interaksi ini dapat terjadi secara khusus dengan melalui beberapa isu internasional, salah satunya adalah isu tentang senjata nuklir. Isu ini dapat menjadi salah satu pertimbangan di dalam kebijakan luar negeri suatu negara, di dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat.

Isu senjata nuklir merupakan salah satu isu yang tidak pernah luput dalam menghiasi dinamika politik global. Isu yang bersifat militeristik ini selalu menjadi salah satu pokok bahasan pada studi keamanan internasional meskipun pasca perang dingin orientasi kajian keamanan internasional telah bergeser ke isu-isu yang bersifat *low politics* seperti lingkungan, ekonomi, kemanusiaan, narkoba dan lain sebagainya. Pengaruh senjata nuklir terhadap percaturan politik internasional adalah suatu hal yang tidak boleh diremehkan, karena terbukti bahwa senjata nuklir dengan semua perkara yang terkait dengannya menjadi perhatian para elit pembuat kebijakan dari berbagai negara yang terlibat dan kemudian digunakan sebagai instrumen kebijakan dan diplomasi.

Selain memiliki pengaruh penting terhadap politik internasional, isu senjata nuklir juga telah masuk pada kategori isu keamanan yang bersifat global

(*global security*). Hal tersebut terlihat dari besarnya perhatian media massa dan masyarakat internasional. Senjata nuklir juga banyak dijadikan sebagai objek studi dan penelitian oleh banyak lembaga penelitian serta termuat dalam agenda organisasi internasional. Semua indikator tersebut menunjukkan bahwa senjata nuklir telah dianggap sebagai ancaman penting bagi dunia. Oleh karena itu muncullah sebuah usaha untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi nuklir serta mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Hal tersebut diawali dan dikenal dengan sebuah perjanjian internasional bernama *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* atau biasa dikenal sebagai *Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang berlaku mulai tahun 1970. Disamping NPT, terdapat satu perjanjian internasional lain terkait upaya untuk pencegahan proliferasi nuklir, yang mana perjanjian ini kembali menjadi pembicaraan dalam politik internasional karena dinamika yang terjadi terhadapnya, perjanjian ini bernama *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah sebuah nama resmi dari perjanjian nuklir Iran yang biasa disebut sebagai *Iran Nuclear Deal* atau *Iran Deal*. Perjanjian ini diikuti oleh Iran dan negara-negara *Permanent Five* (P5) + 1 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris dan Jerman yang mana terbentuk pada tanggal 14 Juli 2015. JCPOA disahkan dan diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Juli 2015 dalam Resolusi 2231 (https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance, diakses 5 Maret 2019).

Meksipun telah meratifikasi perjanjian NPT pada tahun 1970 sebagai *non-nuclear weapons states* (NNWS), Iran diduga melakukan aktivitas proliferasi nuklir yang besar untuk tujuan militer. Sebagai contoh, berbagai tuduhan yang ditujukan terhadap program nuklir Iran telah ada semenjak tahun 1980-an dimana pada saat itu Iran memulai kembali program nuklirnya yang dibantu oleh Pakistan, China dan Rusia untuk mengembangkan infrastruktur penambangan uranium Iran. Seiringan dengan hal itu, tuduhan dari Amerika Serikat (AS) terhadap program nuklir Iran pun mulai muncul, yaitu AS mencurigai Iran telah melakukan aktivitas pengembangan senjata secara rahasia yang berkedok sebagai program nuklir sipil (https://www.nti.org/learn/countries/iran/nuclear/, diakses 5 Maret 2019). Tuduhan dan sangkalan telah banyak terjadi dalam dinamika program nuklir Iran ini, serta sanksi dari berbagai pihak yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa dan Amerika Serikat telah banyak diterapkan untuk Iran sebagai upaya untuk menghentikan proliferasi nuklirnya serta Iran pun dianggap telah melanggar perjanjian NPT. Seperangkat hal tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi adanya *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dengan memakan proses negosiasi yang panjang.

Seperti yang tertuang di dalam kata pengantar JCPOA, kesepakatan ini ditujukan untuk memastikan bahwa program nuklir Iran akan sepenuhnya atas dasar damai, sekaligus menghilangkan sanksi terhadap Iran yang berasal dari PBB, AS dan Uni Eropa (Kata Pengantar, JCPOA). JCPOA difasilitasi oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sebagai badan yang melakukan pemantauan terhadap semua aktivitas program nuklir Iran.

JCPOA dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dan pemimpin P5+1 lainnya. Mereka menegaskan bahwa JCPOA adalah cara yang paling efektif untuk meyakinkan bahwa Iran tidak akan atau tidak bisa menciptakan senjata nuklir dan semua pilihan Amerika Serikat untuk mencegah Iran dari mengembangkan senjata nuklir tersedia tanpa batas, dalam arti Amerika Serikat akan melakukan apa saja untuk menghentikan program nuklir Iran. Perjanjian ini juga mengandung ketentuan sanksi dari PBB, Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mana akan diterapkan kembali apabila Iran melanggar komitmennya. Dengan adanya kesepakatan JCPOA ini, sanksi tersebut dihilangkan dan menyetujui serta menugaskan IAEA untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua fasilitas nuklir Iran.

Selama masa kampanye Presiden hingga dilantiknya sebagai Presiden AS, Donald Trump terus melayangkan kritik dengan lantang terkait perjanjian ini. Pada masa kampanye, Trump berjanji berusaha untuk menegosiasikan kembali perjanjian dengan tujuan menegakkan ketentuan secara ketat atau keluar dari perjanjian tersebut (http://lobelog.com/can-the-iran-deal-survive-a-us-withdrawal/, diakses 6 Maret 2019). Setelah menjabat presiden, Donald Trump banyak mengeluarkan kritiknya. Beberapa pernyataan Presiden Donald Trump terkait perjanjian JCPOA ini adalah kritiknya terhadap pemerintahan Presiden Barack Obama sebelumnya. Trump menganggap bahwa kebijakan AS terhadap Iran pada saat pemerintahan sebelumnya sangat kontras dengan kebijakannya pada saat ini. Kritik-kritik tersebut terkait dengan isu-isu seperti terorisme Iran yang diklaim menjadi negara sponsor terorisme. Pemerintahan Obama dianggap

gagal melakukan paksaan terhadap Iran. Presiden Donald Trump juga menyebut pemerintah Presiden Obama sebagai pemerintah yang kurang berpikir panjang dalam mengambil keputusan, karena telah menjual sanksi multilateral yang kuat dengan kesepakatan nuklir yang lemah yaitu *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-iran-nuclear-deal/, diakses 6 Maret 2019).

Namun dibalik kritikan tersebut pada masa tahun pertama pemerintahan Trump, pemerintah menunjukkan dukungan terhadap JCPOA. Hal ini ditekankan pada pertemuan pemerintah Amerika Serikat dengan *High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy* yaitu Frederica Mogherini pada 10 Februari 2017, pertemuan dengan fokus bahasan JCPOA ini menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat meyakinkan bahwa mereka akan sepenuhnya melaksanakan kesepakatan tersebut (http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-eu-idUSKBN15P1XM, diakses 6 Maret 2019).

Namun setelah beberapa bulan kemudian pemerintah AS berubah sikap, terlihat dari beberapa pernyatan para pejabat Amerika Serikat menunjukkan permusuhan atau antipatinya terhadap JCPOA. Sekretaris negara Rex Tillerson mengatakan kepada wartawan pada 19 April 2017 bahwa pemerintah AS akan melakukan peninjauan terhadap JCPOA secara menyeluruh (https://www.presstv.com/DetailFr/2017/04/19/518600/Iran-complying with%20nuclear-deal-Tillerson, diakses 6 Maret 2019). Tillerson mengatakan bahwa ambisi nuklir Iran merupakan risiko besar bagi perdamaian dan keamanan internasional. Tillerson berpendapat bahwa JCPOA gagal mencapai tujuan yaitu

menjadikan Iran sebagai negara non-nuklir, JCPOA hanya menunda mereka menjadi negara nuklir (Kerr & Katzman, 2018:22).

Pada 12 Januari 2018, Presiden Donald Trump menuntut amandemen baru terhadap perjanjian JCPOA, yaitu menuntut Iran untuk memberikan izin inspeksi terhadap semua situs nuklir yang dimilikinya dengan tepat waktu dan segera, memastikan Iran tidak memproduksi bahan *fissile* untuk senjata nuklir dalam waktu kurang dari satu tahun, menerapkan kembali sanksi apabila Iran tidak mematuhi tuntutan baru ini dan menuntut bahwa JCPOA harus menyatakan bahwa program rudal jarak jauh dan senjata nuklir adalah satu kesatuan sehingga pengembangan dan pengujiannya harus dikenai sanksi yang berat (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-iran-nuclear-deal/, diakses 6 Maret 2019).

Setelah pernyataan tersebut, masing-masing perwakilan dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman bertemu beberapa kali dan membahas permintaan Presiden Trump, namun tidak mencapai kesepakatan. Pada 8 Mei 2018, Presiden Trump mengatakan bahwa kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, dan kemudian mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi berpartisipasi dalam JCPOA dan akan menerapkan kembali sanksi yang diangkat oleh JCPOA (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/, diakses 6 Maret 2019).

Kemudian pemerintah Amerika Serikat kembali mengeluarkan tuntutan terhadap JCPOA apabila diinginkannya perjanjian baru yaitu IAEA harus

mendapat laporan dari Iran secara lengkap. Iran dituntut untuk menyatakan kepada IAEA laporan lengkap tentang dimensi militer dari program nuklirnya. Iran juga diminta untuk memberikan akses IAEA ke seluruh situs nuklirnya tanpa terkecuali. Masih terkait masalah inti yaitu nuklir, AS menuntut Iran untuk menghentikan proliferasi rudal balistiknya.

Terdapat masalah lain yang mana masih dalam ruang lingkup mundurnya AS dari JCPOA namun tidak terkait nuklir. Beberapa hal tersebut seperti, AS menuntut Iran untuk menghentikan semua dukungannya terhadap kelompok teroris yang disponsorinya, seperti Houthi di Yaman dan Korps Garda Revolusi Islam. Iran juga dituduh menahan warga AS tanpa bukti dan menuntut untuk membebaskan semua warga AS. Selain itu, AS juga mendesak Iran untuk menarik semua pasukan yang ada dibawah komando Iran yang ada di Suriah dan menghentikan semua aktivitas mengancam dan berbahaya dari Iran terhadap sekutu AS di Timur Tengah (Kerr & Katzman, 2018:24-25).

Sebagai sedikit cerminan bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran yang terdapat di dalam kerangka isu senjata nuklir ini adalah kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran pada masa Presiden Obama. Upaya Obama untuk menghentikan program nuklir Iran adalah dengan sanksi dan embargo. Seperti embargo senjata tahun 2010 dan 2012 yaitu embargo minyak dan lain-lain. Hal ini dihilangkan dengan adanya JCPOA. Namun dengan mundurnya AS dari JCPOA pada masa pemerintahan Presiden Trump maka kebijakan AS terhadap Iran juga mengalami perubahan.

Arah kebijakan luar negeri AS terhadap Iran juga tercermin di dalam *National Security Strategy*-nya (NSS) yang dirilis pada Desember 2017 yang lalu. Arah kebijakan AS terhadap Iran tercermin dengan berbagai tuduhan AS terhadap Iran dan juga JCPOA. Iran yang merupakan objek dari JCPOA tersebut disebut sebanyak 17 kali di dalam NSS dengan berbagai macam isu baik terkait senjata nuklir, perjanjian nuklir maupun isu lainnya. Di dalam NSS yang mengusung doktrin atau prinsip *America First* itu AS juga memberikan predikat *rogue state* untuk Iran (NSS, 2017:25). Kemudian AS menyebutkan bahwa kesepakatan nuklir (JCPOA) adalah sebuah perjanjian yang buruk yang telah diabaikan dan menyebutkan bahwa Iran masih melakukan pengembangan senjata nuklir atau aktivitas berbahaya lainnya meskipun telah dibentuknya JCPOA (NSS, 2017:49). Secara umum NSS juga menggambarkan ambisi AS untuk mencegah penyebaran senjata nuklir di dunia, hal ini terlihat dengan diletakkannya isu ini pada aksi prioritas AS dalam pilar yang pertama dari NSS yaitu *Protect The American People, The Homeland, and The American Way of Life* (NSS, 2017:7-8).

Mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA ini mengundang banyak reaksi, IAEA mengeluarkan pernyataan bahwa Iran memegang komitmennya terhadap JCPOA. IAEA memverifikasi dan memantau implementasi komitmen nuklir Iran di bawah perjanjian JCPOA. Hingga pernyataan dikeluarkan pada 9 Mei 2018, IAEA mengkonfirmasi bahwa komitmen Iran terhadap peraturan yang tertera pada JCPOA sedang dilaksanakan oleh Iran serta tunduk pada perjanjian tersebut (https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-by-iaea-director-general-yukiya-amano-9-may-2018, diakses 6 Maret 2019). Keluarnya Amerika Serikat

dari JCPOA menarik kritik luas di antara pihak-pihak terkait lainnya di JCPOA. Negara lainnya yang tergabung dalam JCPOA menegaskan bahwa menerapkan kembali berbagai kebijakan seperti sanksi-sanksi sepihak dari Amerika Serikat tampaknya melanggar JCPOA (Kerr & Katzman, 2018:25).

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi. Pertama, skripsi dari Akbar Kurniadi dari jurusan hubungan internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 dengan judul penelitian, *"Kesepakatan Amerika Serikat Menyetujui Joint Plan of Action (JPOA) dengan Iran Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran 2015"*. Kemudian dengan tema yang sama dan judul yang hampir mirip terdapat skripsi Tri Desminarti dari jurusan ilmu hubungan internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul penelitian *"Persetujuan Amerika Serikat dalam Joint Comprehensive Plan of Action terkait Nuklir Iran tahun 2015"*. Dalam penelitian tersebut Akbar Kurniadi dan Tri Desminarti menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke JCPOA. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas JCPOA. Perbedaannya adalah penelitian Akbar Kurniadi dan Tri Desminarti menganalisis mengapa Amerika Serikat bergabung dengan JCPOA, sedangkan peneliti disini membahas mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA yang kemudian ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan AS terhadap Iran.

Kedua, Skripsi Merisa Dwi Juanita dari jurusan ilmu hubungan internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017 dengan

judul penelitian, *"Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2015*". Dalam penelitian tersebut Merisa Dwi Juanita menganalisis dan mencari tahu kepentingan nasional Amerika Serikat di dalam JCPOA dan perubahan arah kebijakan dari Presiden Bush ke Presiden Obama. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas Amerika Serikat dan JCPOA, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas masa pemerintahan presiden Bush dan Obama, sedangkan peneliti membahas mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA dan kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan presiden Donald Trump.

Ketiga, skripsi Ismi Karima dari jurusan ilmu hubungan internasional, Universitas Airlangga pada tahun 2018 dengan judul penelitian *"Penandatanganan Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action oleh Iran tahun 2015"*. Dalam penelitian tersebut Ismi Karima menganalisis perubahan kebijakan Iran terkait JCPOA. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas JCPOA dan Iran. Perbedaannya adalah penelitian Ismi Karima menganalisis proses berubahnya kebijakan Iran hingga mau mengikuti JCPOA atau fokus pada politik luar negeri Iran, sedangkan peneliti fokus pada analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Kemudian penelitian lainnya yang mana dibutuhkan untuk membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap masalah mundur atau keluarnya dari perjanjian internasional yaitu skripsi dari Raudatul Jannah Yamlean dari jurusan ilmu hubungan internasional, Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2018 dengan judul penelitian *"Analisa Kebijakan Amerika*

Serikat Menarik Diri dari Paris Agreement di bawah Pemerintahan Donald Trump Tahun 2017". Penelitian dari Raudatul ini diperlukan oleh peneliti untuk dijadikan sumber perbandingan karena serupa membahas mundurnya Amerika Serikat dari sebuah perjanjian internasional.

Keputusan mundurnya AS dari JCPOA ini menarik untuk dibahas, dikarenakan AS mengeluarkan berbagai kebijakan pasca mundurnya dari JCPOA yang tentu kebijakan tersebut akan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap Iran. Amerika Serikat sebagai pihak yang menyendiri dalam hal ini, negara lain yang tergabung di dalam JCPOA menyatakan bahwa Iran memegang komitmennya dalam JCPOA serta IAEA sebagai fasilitator dan pengawas program nuklir Iran menyatakan bahwa Iran tunduk dalam regulasi yang telah diterapkan JCPOA. Semua penyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran. Mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA ini juga berlandaskan isu yang ada diluar masalah nuklir Iran, seperti terorisme, pelangganggaran hak asasi manusia, penahanan warga Amerika Serikat secara sewenang-wenang dan lain sebagainya seperti yang tertuang di dalam *National Security Presidential Memorandum-11* yang dirilis pada 8 Mei 2018.

Setelah mundurnya AS dari perjanjian ini, AS kembali menerapkan sanksi terhadap Iran. Adapun sanksi-sanksi periode pertama yang diterapkan kembali pada 5 November 2018 yang lalu adalah terkait penerbangan, perbankan, transportasi laut, minyak dan organisasi program nuklir Iran. Kemudian pada bulan Mei 2019 AS kembali menerapkan sanksinya pada sektor lain. Semua hal

tersebut adalah contoh dari kebijakan yang dikeluarkan oleh AS untuk Iran pasca mundurnya AS dari JCPOA. Hal tersebut tentu memiliki daya tarik untuk diteliti, mengingat perubahan yang signifikan dalam arah kebijakan luar negeri AS yang tentu didasari atas berbagai pertimbangan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul :

"Kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran Pasca Mundurnya Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA)"

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan membahas isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis Politik Luar Negeri, mata kuliah yang mempelajari tentang analisis politik luar negeri suatu negara yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kaitan mata kuliah ini dengan penelitian adalah peneliti menganalisis kepentingan nasional, landasan dan asas-asas yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam menentukan arah politik luar negerinya.
2. Dinamika Politik Internasional, merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang dinamika politik maupun isu-isu politik yang berkembang di dunia yang mempengaruhi percaturan politik dunia tak terkecuali isu nuklir dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang selalu mendominasi politik internasional. Mata kuliah ini berkaitan dengan penelitian karena munculnya fenomena-fenomena baru hubungan internasional tidak terlepas dari aktivitas unit-unit politik internasional.

3. Studi Keamanan Internasional, dalam mata kuliah ini mempelajari mengenai masalah keamanan internasional terkait proliferasi nuklir yang selalu menjadi bahasan menonjol dalam studi ini. Dengan mata kuliah ini peneliti dapat melihat bagaimana kedudukan senjata nuklir di dalam politik global. Sebagai salah satu contoh adalah, senjata nuklir dijadikan sebagai instrumen kebijakan dan diplomasi di dalam interaksi antar aktor hubungan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah mayor sebagai berikut : **"Bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundurnya Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA)"**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan masalah minor yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Amerika Serikat mundur dari perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action* ?
2. Apa saja kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundurnya dari *Joint Comprehensive Plan of Action* ?

3. Bagaimana respon Iran terhadap kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat pasca mundurnya dari *Joint Comprehensive Plan of Action* ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka diperlukan pembatasan masalah yang mana peneliti hanya akan meneliti dan mengambil fenomena dan proses yang terjadi di dalamnya yaitu dari tahun 2017 hingga Juli 2019. Peneliti mengambil rentang waktu ini terkait dengan beberapa alasan. Dimulai dari tahun 2017 karena pada tahun ini presiden Donald Trump mulai menjabat dan telah banyak mengeluarkan kritiknya terhadap perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan berbagai tuduhan terhadap Iran, yang mana kemudian kritik dan tuduhan tersebut berujung pada mundurnya AS dari JCPOA pada tanggal 8 Mei 2018. Hal tersebut dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian terutama terkait dengan analisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Rentang waktu pengambilan fenomena penelitian diakhirkan pada Juli 2019 agar fenomena yang diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan sikap Iran terhadap kebijakan Amerika Serikat tidak terlalu singkat, karena Iran baru terlihat mengambil sikap yang signifikan atas konsekuensi dari kebijakan AS baru mulai terlihat sejak diberlakukannya kembali sanksi AS untuk Iran yang terangkum di dalam mandat JCPOA pada bulan Agustus 2018 yang lalu.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundurnya Amerika Serikat dari perjanjian internasional yaitu *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa atau apa saja faktor yang mendorong Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk mundur dari perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action*.
2. Untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk Iran pasca mundurnya Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan of Action*.
3. Untuk mengetahui bagaimana sikap atau respon Iran dalam menghadapi konsekuensi dari kebijakan yang dikeluarkan Amerika serikat pasca mundurnya dari *Joint Comprehensive Plan of Action*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yakni sebagai berikut :

1. Memberikan suatu gambaran mengenai karakter dan interaksi Amerika Serikat di dalam politik internasional khususnya pada masalah program nuklir Iran.
2. Memberikan gambaran politik luar negeri Amerika Serikat pada pemerintahan Presiden Donald Trump.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan kegunaan diantaranya :

1. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca terutama para penstudi ilmu hubungan internasional untuk mengetahui fenomena yang terjadi di dalam interaksi antara Amerika Serikat dan Iran serta perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action* yang merupakan suatu penghubung antara kepentingan Amerika Serikat dan Iran.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam salah satu yang paling menonjol di dalam kajian keamanan internasional saat ini yaitu isu nuklir, secara khusus program nuklir Iran.